

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 30 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Drs.MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN - ANALISIS MEDIA DAN INFORMASI - BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT - SEKRETARIAT DAERAH
3. NHK : 216745
4. Tanggal Pelaporan : 25 Oktober 2014, 19 Juni 2015

Status Laporan**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 108 m2 & 54 m2, di Kota SEMARANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2010 sampai dengan 2014

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

1. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008

		Status Laporan	
		25 Oktober 2014	19 Juni 2015
	Rp.	175.392.000	Rp. 175.392.000
1.	Rp.	175.392.000	Rp. 175.392.000
	Rp.	87.000.000	Rp. 87.000.000
1.	Rp.	7.000.000	Rp. 7.000.000

	25 Oktober 2014		19 Juni 2015	
2. Mobil, merk SUZUKI AERIO, tahun pembuatan 2003, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp.	80.000.000	Rp.	80.000.000
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA		----		----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA		----		----
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2015 (Penambahan Data Baru)		----	Rp.	30.910.000
C. SURAT BERHARGA	Rp.	0	Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp.	176.600.000	Rp.	183.854.105
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan)	Rp.	176.600.000	Rp.	183.854.105
E. PIUTANG	Rp.	0	Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	Rp.	438.992.000	Rp.	477.156.105
III. HUTANG	Rp.	392.000.000	Rp.	419.814.000
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru)	Rp.	140.000.000	Rp.	167.814.000
2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG	Rp.	252.000.000	Rp.	252.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	46.992.000	Rp.	57.342.105

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

